

## Ekspor Revolusi Islam dan Identitas Republik Islam Iran

Naldo Helmys\*  
naldo.helmys@gmail.com

### Abstract

*Having been considered as rational actor acting based on national interests, sovereign states is also understood have their own identities. Moreover, state identities have pivotal role on determining state behavior in international social structure. Stand on that assumption, this paper will describe the four state identities of Islamic Republic of Iran that assist to find an answer for interesting question: why did Iran export their Islamic Revolution throughout Middle East during Ayatollah Khomeini's era (1979-1989)? During export of revolution, Iran was in war with Iraq and ideologically conflicted with Saudi while its fundamental ideology was spread across by propagating via international radio network and supporting oppressed nations in some countries. This historical phenomenon will be explained by Constructivism in International Relations, especially based on Alexander Wendt's Social Theory of International Politics. It can be seen that there are four identities of Iran: as an Islamic Iran nation, velayat-e faqih-based Islamic Republic, core of Islamic world, and part of Pan-Islam.*

**Keyword:** Export of Revolution, State Identity, Islamic Republic of Iran

---

\*Lulusan Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas tahun 2015.

## A. Pendahuluan

Di panggung perpolitikan Timur Tengah, kehadiran Republik Islam Iran sejak tahun 1979 secara signifikan berkontribusi dalam penentuan konfigurasi keamanan di kawasan tersebut, yang juga menjadi pokok perhatian masyarakat internasional. Terakhir kali, pemutusan hubungan diplomatik Iran oleh Arab Saudi pada 3 Januari 2016 telah menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak, termasuk Pemerintah Indonesia.<sup>1</sup> Namun, hal itu bukan kali pertama hubungan Iran dengan negara di sekitarnya memicu ketidakstabilan kawasan.

Pada sepuluh tahun pertamanya berdiri (1979-1989) di bawah kepemimpinan Ayatollah Khomeini, Iran telah memicu perang dengan Irak, ketegangan dengan Arab Saudi, dan pemberontakan di berbagai negara. Adapun istilah yang diberikan untuk model politik luar negeri Iran saat itu adalah “ekspor revolusi” yang sederhananya dipahami sebagai propaganda koersif dan persuasif untuk menyebarkan ideologi Revolusi Islam ke seluruh dunia Islam. Menurut Katzman,

ideologi ini masih mempengaruhi politik luar negeri Iran.<sup>2</sup>

Dilatarbelakangi oleh fenomena di atas, tulisan ini mencoba untuk melihat dua hal. Pertama, apa sebetulnya dan bagaimana ekspor revolusi tersebut berlangsung. Hal ini akan dijelaskan dengan mengacu kepada penjelasan Fred Halliday. Kedua, seperti apa identitas Republik Islam Iran yang menentukan arah kepentingan nasional dan politik luar negeri negara tersebut.

Persoalan yang kedua ini dibedah dengan empat konsep identitas negara esensial: identitas korporat, identitas tipe, identitas peran, dan identitas kolektif yang dirumuskan oleh Alexander Wendt. Identitas ini terbentuk ketika Iran melihat dirinya sendiri dalam hubungannya dengan pihak lain.

## B. Ekspor Revolusi Iran 1979-1989

Ekspor revolusi bukanlah sesuatu yang asing di dalam kajian Hubungan Internasional, khususnya ketika mengamati perilaku negara yang lahir dari sebuah revolusi. Menurut Halliday, ekspor revolusi adalah tindakan-tindakan atau aksi-aksi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara yang telah berhasil meraih kemenangan untuk mempromosikan

<sup>1</sup>Simela Victor Muhammad, “Krisis Hubungan Arab Saudi-Iran,” *Info Singkat Hubungan Internasional* VIII, no. 01 (Januari 2016):5-7.

<sup>2</sup>Kenneth Katzman, “Iran’s Foreign Policy,” *Congressional Research Service* (Januari 2016), 2.

revolusi yang sama ke negara lain.<sup>3</sup> Semua negara revolusioner, nyaris tanpa terkecuali, akan mempromosikan revolusi mereka ke negara lain dengan tujuan mengubah hubungan sosial dan politik di negara-negara tersebut.<sup>4</sup>

Iran sebagai negara yang lahir dari Revolusi Islam 1979 merupakan model yang sesuai untuk menggambarkan bagaimana negara revolusioner mengeksport revolusi mereka. Khomeini pada tanggal 21 Maret 1980 menggaris bawahi bahwa ekspor revolusi harus dilakukan karena dua alasan. Pertama, pada prinsipnya Islam adalah agama yang anti penindasan. Apabila perlawanan terhadap penindasan berhasil dilaksanakan di Iran lewat Revolusi Islam 1979, maka hal tersebut sudah sepatutnya dilakukan di wilayah Islam lainnya. Kedua, adanya kekhawatiran bahwa negara adidaya akan bertindak membasmi Iran apabila negara tersebut tetap mengurung dirinya.<sup>5</sup>

Berdasarkan metodenya, ekspor revolusi Iran dilakukan lewat dua cara: persuasif dan koersif. Cara pertama merujuk kepada propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Iran sendiri maupun oleh para fanatis yang percaya dengan ide-ide revolusi. Sedangkan upaya kedua dilakukan dengan perang terbuka, membentuk kelompok jihad di negara lain, dan mendukung beberapa kudeta.

Propaganda dalam bahasa Persia adalah *tablighat*, yang sepadan dengan kata ‘dakwah’ dalam bahasa Indonesia. Kata ini biasanya digunakan untuk penyebaran pesan-pesan agama. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan politis Iran dalam mengeksport revolusi memiliki akar kultural keislaman yang kuat. Said Hajjarian mengakui bahwa sudah menjadi hal yang lumrah apabila Iran melakukan propaganda karena setiap negara melakukannya. Namun, menurutnya, pola propaganda Iran dilakukan dengan mengajarkan Quran.<sup>6</sup>

Dalam wujud konkritnya, propaganda Iran dilakukan dengan memanfaatkan *Islamic Republic of Iran Broadcasting* (IRIB), jaringan radio milik pemerintah yang melakukan penyebaran berita secara global. Pada masa awal

---

<sup>3</sup>Fred Halliday, *Revolution and World Politics: The Rise and Fall of the Sixth Great Power* (Durham: Duke University Press, 1999), 94-32.

<sup>4</sup>Fred Halliday, “The Sixth Great Power: on the Study of Revolution and International Relations.” *Review of International Studies*, 16/3 (1990), 214.

<sup>5</sup>Ayatollah Khomeini, *Sahifeh-ye Imam: An Anthology of Imam Khomeini's Speeches, Messages, Interviews, Decrees, Religious Permissions, and Letters* vol. 12, (Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Work, 2008), 176.

---

<sup>6</sup>Christin Marschall, *Iran's Persian Gulf Policy: From Khomeini to Khatami* (London: Routledge, 2003), 28.

revolusi, Khomeini memberi kepercayaan kepada Sadegh Ghotbzadeh, salah seorang ajudannya selama masa pembuangan di Paris, untuk mengepalai IRIB. Menurut Pierre Pahlavi, IRIB memiliki 45 cabang di seluruh dunia, termasuk di Jerman, Brazil, Malaysia, dan Amerika Serikat. IRIB menyebarkan informasi melalui gelombang pendek dan satelit seperti Telstar 5, Telstar 12, dan Arabsat 2D dalam 27 bahasa di dunia, termasuk bahasa Albania, Jerman, Inggris, Arab, Azeri, Bosnia, Balukh, Kurdi, Spanyol, Prancis, Ibrani, Italia, dan Rusia. Konten radio diatur oleh pemerintah agar pesan-pesan revolusi tersampaikan. Misalnya, konten bersifat kultural diawasi langsung oleh Kementerian Kebudayaan dan Bimbingan Islam. Di samping itu, badan lain yang mengawasi konten IRIB adalah Organisasi Kebudayaan dan Hubungan Islam (ICRO) yang dikatakan secara *de facto* sebagai organisasi diplomasi kultural Iran. Tujuan ICRO adalah untuk mempromosikan hubungan kultural antar bangsa-bangsa dan komunitas-komunitas internal Iran; mengonsolidasikan hubungan kultural Iran dengan bangsa-bangsa lain; mempresentasikan kebudayaan dan peradaban Iran; menyiapkan basis persatuan di antara Muslim di seluruh dunia; membangkitkan dan mempromosikan kultur dan ajaran Islam ke seluruh dunia; dan menyebarkan

informasi mengenai prinsip-prinsip dan realitas-realitas dari Revolusi Islam.<sup>7</sup>

Di samping menggunakan IRIB, ekspor revolusi yang persuasif juga dilakukan oleh Iran dengan menggelar pertemuan agama berkelas internasional. Pertemuan ini terselenggara pada Maret 1982 atas prakarsa Asosiasi Ulama Militan dan Korps Garda Revolusioner Iran (IRGC) di Tehran. Pertemuan tersebut berhasil menjaring ulama-ulama dari Iran, Kuwait, Saudi, Bahrain, dan Lebanon. Kemudian pada Januari 1983, Iran menyelenggarakan Kongres Imam Jumat dan Pemimpin Shalat. Pertemuan ini mencapai resolusi final pada Kongres Imam Jumat se-Dunia di Tehran pada Mei 1984 dengan penegasan terhadap persatuan gerakan-gerakan di dalam Dunia Islam dan dukungan penuh terhadap gerakan-gerakan pembebasan dan kemerdekaan.<sup>8</sup> Iran juga pernah menggelar Internasional Islam Revolusioner pada Februari 1984 sebagai tandingan atas pertemuan Organisasi Konferensi Islam di Kasablanka, Maroko.<sup>9</sup>

Di samping melakukan propaganda, Iran juga melakukan ekspor revolusi

<sup>7</sup>Pierre Pahlavi, "Understanding Iran's Media Diplomacy," *Israel Journal of Foreign Affairs*, vol. 6, no. 2 (2012). 22-23.

<sup>8</sup>Maryam Panah, *The Islamic Republic and the World: Global Dimensions of the Iranian Revolution* (London: Pluto Press, 2007) 70.

<sup>9</sup>Christin Marschall., 28.

dengan penggunaan cara-cara kekerasan. Adapun instansi yang menonjol dalam melakukan peranan ini adalah IRGC, kesatuan bersenjata khusus yang terpisah dari angkatan bersenjata konvensional yang bertujuan untuk mempertahankan revolusi. Menurut Hinnebusch, IRGC, beserta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Intelijen Iran adalah pihak yang mendanai Front Islam Pembebasan Bahrain (IFLB), sebuah kelompok militan Syiah yang bermaksud menggulingkan pemerintahan di Bahrain pada Desember 1981.<sup>10</sup> Di Kuwait, Iran menjalin hubungan dengan kelompok oposisi Brigade Revolusioner Arab yang dipimpin oleh Abbas al-Muhri, ipar Khomeini.<sup>11</sup>

Hubungan Iran dengan Irak yang berujung pada perang sewindu juga dianggap bagian dari ekspor revolusi. Kelompok oposisi Syiah yang menentang rezim Saddam Hussein membentuk organisasi Dewan Agung Revolusi Islam di Irak (SCIRI) pada September 1981. Kelompok ini didirikan oleh Baqir al-Hakim yang memiliki akses langsung dengan Khomeini. Peran IRGC dalam mendukung SCIRI adalah dengan memberikan bantuan finansial dan

pelatihan militer.<sup>12</sup> SCIRI adalah satu dari beberapa kelompok oposisi di Timur Tengah yang mendapatkan pelatihan di Taleghani Centre, Tehran. Dari tempat itu mereka dikirimkan ke kamp pelatihan paramiliter yang tersebar di Tehran, Ahvaz, Isfahan, Qom, Shiraz, Mashad, dan Bushehr, dan dilatih oleh IRGC.<sup>13</sup> Terakhir, IRGC berhasil menginfiltrasi kelompok militan Syiah di Lebanon pada 1980. Dua tahun kemudian kelompok tersebut bertransformasi menjadi Hizbullah.<sup>14</sup>

### C. Empat Identitas Republik Islam Iran

Fenomena ekspor revolusi yang dilakukan Iran tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional negara tersebut. Namun, kepentingan itu juga dibentuk terlebih dahulu oleh identitas nasional Iran sebagai sebuah negara. Oleh karena itu, mengetahui identitas Iran adalah kunci untuk memahami politik luar negeri Iran di Timur Tengah.

Dalam pengertian yang sangat luas, identitas merupakan apapun yang membuat segala sesuatu menjadi sesuatu. Namun, pemahaman seperti ini sebatas menempatkan identitas sebagai pengertian akan 'Diri' (*Self*). Dalam Konstruktivisme

<sup>10</sup>Raymond Hinnebusch, *The International Politics of the Middle East* (Manchester: Manchester University Press, 2003), 194.

<sup>11</sup>Christin Marschall., 33.

<sup>12</sup>Soren Schmidt, "The Role of Religion in Politics: The Case of Shia-Islamism in Iraq" *Nordic Journal of Religion and Society*, vol.22, no.2 (2009), 128-129.

<sup>13</sup>Christin Marschall., 31-32.

<sup>14</sup>Maryam Panah., 73-74.

Wendt, agar identitas itu bekerja, diperlukan juga ‘Pihak Lain’ (*Other*) sehingga identitas dipahami sebagai sesuatu yang intersubjektif. Sebagai perumpamaan, seorang budak mendapatkan identitasnya sebagai budak karena adanya hubungan dengan pihak lain, yaitu tuannya. Dari pengertian itu, terdapat empat bentuk identitas yang bisa disematkan kepada negara menurut Wendt, yaitu: 1) personal atau korporat, 2) jenis, 3) peran, dan 4) kolektif.<sup>15</sup>

Identitas personal atau korporat (*personal or corporate identity*) dibentuk oleh pengaturan diri, struktur-struktur *homeostatic* (keseimbangan internal) yang membuat aktor membedakan entitas-entitas lainnya. Dalam konteks manusia, identitas personal ini sama pentingnya dengan tubuh itu sendiri. Namun, yang paling pokok adalah adanya kesadaran dan ingatan akan ‘Diri’. Tanpa adanya kesadaran dan ingatan akan ‘ke-aku-an’ maka seseorang tidak bisa dikatakan memainkan peran sebagai agensi. Dalam konteks negara, identitas korporat—disebut korporat karena negara adalah sesuatu yang terorganisir—menjadi penting karena meskipun negara tidak memiliki ‘tubuh’, identitas korporatnya terlihat ketika anggota-anggota negara memiliki

narasi bersama yang menjadikan mereka sebagai sebuah aktor korporat. Identitas korporat kemudian menjadi peron untuk memahami identitas lainnya.<sup>16</sup>

Wendt mendefinisikan ‘identitas tipe’ (*type identity*) sebagai kategori sosial atau label yang disematkan kepada orang-orang yang berbagi beberapa ciri, seperti dalam bentuk, kebiasaan, perilaku, nilai, kecakapan, pengetahuan, opini, pengalaman, kebersamaan historis, dan sebagainya. Identitas jenis bersifat intrinsik pada aktor terlepas pihak lain mengakuinya atau tidak. Dalam konteks negara, identitas jenis mewujudkan dalam bentuk ‘tipe rezim’ atau ‘bentuk negara’ seperti negara kapitalis, negara fasis, negara monarki, dan sebagainya.<sup>17</sup>

Berbeda dengan identitas jenis yang bersifat intrinsik, identitas peran (*role identity*) disandarkan kepada hubungan dengan ‘Pihak Lain’. Identitas ini hanya muncul ketika agen mengambil posisi di dalam struktur sosial. Dalam politik internasional, Wendt memosisikan negara berdaulat sebagai bentuk dari adanya identitas peran dikarenakan kedaulatan itu sendiri membutuhkan pengakuan oleh negara lain. Identitas peran juga dapat berbentuk ‘teman’ atau ‘musuh’ sehingga

<sup>15</sup>Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 224.

<sup>16</sup>*Ibid.*, 224-225.

<sup>17</sup>*Ibid.*, 226.

negaratetap dikatakan memilikinya meskipun sedang berperang. Wendt sampai pada kesimpulan bahwa peran definisikan tidak bergantung kepada proses institusionalisasi melainkan pada derajat ketergantungan atau keintiman antara 'Diri' dengan 'Pihak Lain'.<sup>18</sup>

Identitas kolektif (*collective identity*) menjadi bentuk terakhir yang dibicarakan Wendt. Identitas kolektif bergantung kepada hubungan antara 'Diri' dengan 'Pihak Lain' yang mewujudkan dalam bentuk 'identifikasi'. Identifikasi merupakan proses kognitif dimana perbedaan antara Diri-Pihak Lain menjadi buram, bahkan sama sekali menjadi transenden. Biasanya, identifikasi hanya ada pada isu-isu tertentu dan jarang sekali bersifat menyeluruh. Dalam konteks negara, identitas kolektif tampak ketika beberapa aktor negara menuju kepada upaya penyamaan diri.<sup>19</sup>

Mengacu kepada konsep identitas negara yang dirumuskan Wendt, tulisan ini mencoba memaparkan hasil temuan dari penelitian sederhana mengenai identitas Republik Islam Iran. Hasil temuan dapat dirangkum yaitu bahwa Iran memiliki: 1) identitas korporat: Iran Islam; 2) identitas tipe: Republik Islam berdasarkan *velayat-e*

*faqih*; 3) identitas peran: *Umm al-Qura*' (pusat dunia Islam); yang pada akhirnya bermaksud untuk mencapai 4) identitas kolektif: Pan-Islam atau kesatuan *Ummah Islam*.

### Identitas Korporat

Pada Republik Islam Iran identitas korporatnya adalah dirinya sendiri yaitu 'Iran Islam'. Hal ini terlihat abstrak, tapi bisa dikonkritkan dengan mencari tahu bagaimana Iran melihat imaji dirinya sendiri (*self-image*) sebagai kesatuan 'Iran dan Islam'. Imaji diri sendiri sebuah bangsa biasanya akan diterjemahkan melalui simbol-simbol nasional yang menjadi atribut tak terpisahkan untuk memahami identitas korporat negara.

Simbol-simbol nasional Iran yang merepresentasikan 'Iran Islam' tertuang dalam beberapa pasal di dalam Konstitusi seperti: bahasa dan aksara resmi nasional adalah Persia (pasal 15); bahasa Arab wajib dipelajari karena ia adalah bahasa Quran (pasal 16); penanggalan Islam (lunar) digunakan untuk urusan agama dan penanggalan masehi (solar) untuk urusan pemerintahan (pasal 17); dan bendera tiga warna yang disematkan lambang khusus Republik Islam adalah bendera resmi Iran (pasal 18). Bendera tiga warna Iran terdiri dari warna hijau yang melambangkan Islam, putih perlambang

<sup>18</sup>Ibid., 228.

<sup>19</sup>Ibid., 229.

perdamaian, dan merah yang bermakna keberanian. Pada bagian tengah terdapat lambang khusus Republik Islam yaitu enkripsi Allah dalam Bahasa Arab yang ditulis dengan warna merah. Terdapat pula enkripsi *Allah Akbar* dalam Bahasa Arab bergaya kaligrafi kufi yang muncul dua puluh dua kali di bagian atas dan bawah.<sup>20</sup>

Menurut Wendt, 'ke-aku-an' negara ini ada di dalam kesadaran dan terlihat ketika orang-orang di negara tersebut memiliki narasi yang sama. Sehingga di balik simbol-simbol nasional terdapat pula narasi yang disepakati mereka yang menggunakan simbol tersebut yang mana di dalamnya terdapat makna. Narasi ini turut menegaskan identitas korporat RII sebagai Iran Islam. Abrahamian melihat bahwa Iran tidak bisa melepaskan identitas Islam Syi'ah dan identitas kesejarahan Iran pra-Islam yang besar di masa lampau melalui imperium seperti Achaemenes, Parthia, dan Sassan. Di sinilah letak narasi bersama tersebut bahwa dari dulu yang relatif tidak berubah adalah ide mengenai *Iran Zamen* (Tanah Iran) dan *Iran Shahr* (Negeri Iran). Orang Iran mengenal dengan baik dua narasi. Pertama adalah *Shāhnameh* (Kitab Raja-Raja) karya Ferdowsi (940-1020), epos agung Bangsa

Iran yang bercerita mulai dari Kaiumers, manusia pertama dalam mitologi Iran, hingga kematian Rostam, pahlawan dalam epos tersebut.<sup>21</sup> Kedua adalah narasi Islam historis yang mengambil Nabi Muhammad dan Ahlul Bait sebagai sentralnya termasuk bagaimana gugurnya Imam Hussein di Karbala yang dikenang oleh Muslim Syi'ah manapun. Menurut Abrahamian, dua tradisi ini mempengaruhi orang-orang Iran hingga sekarang.<sup>22</sup>

### Identitas Tipe

Berbentuk 'Republik Islam' dengan rezim yang berkuasa berupa pemerintahan para yuris Islam (dikenal dengan istilah *velayat-e faqih*) menunjukkan identitas tipe yang dimiliki oleh Iran. Menurut Wendt, identitas tipe dibangun oleh prinsip-prinsip internal legitimasi politis yang mengatur hubungan negara dan masyarakat. Demikian pula halnya dalam konteks Iran, bahwa identitas tipe sebagai 'Republik Islam' berakar dari prinsip-prinsip internal.

Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 Konstitusi Iran, bentuk pemerintahan 'Republik Islam' ini disokong oleh rakyat. Republik Islam ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2

<sup>20</sup>A. Shapur Shahbazi, "Flags," dalam *Encyclopaedia Iranica*, ed. Ehsan Yarshater, vol. X, Fasc. 1 (California: Mazda Publisher, 2001), 12-27.

<sup>21</sup>Ervand Abrahamian, *A History of Modern Iran* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 2.

<sup>22</sup>*Ibid.*, 2.

dibangun di atas keyakinan terhadap: 1) Keesaan Tuhan, kedaulatan eksklusif dan hak Tuhan untuk membuat hukum, dan keharusan untuk berserah diri terhadap perintah-perintah Tuhan; 2) wahyu ilahiah dan peran fundamentalnya dalam menyusun hukum-hukum selanjutnya; 3) berpulang kepada Tuhan pada Hari Akhir, dan peran konstruktif keyakinan ini pada jalan kembalinya manusia kepada Tuhan; 4) keadilan Tuhan dalam penciptaan dan pembuatan hukum-hukum; 5) kepemimpinan(imamah) yang berkelanjutan dan panduan abadi, dan peran fundamentalnya dalam menjamin proses revolusi Islam; 6) kemuliaan harkat dan martabat manusia, dan kebebasan manusia bergandengan dengan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan; yang mana dalam kesetaraan, keadilan, kebebasan politik, ekonomi, sosial, dan kultural, dan solidaritas nasional terjamin oleh jalan lain untuk: a) ijtihad berkelanjutan dari fuqaha yang memenuhi kualifikasi, terlatih dalam Quran dan Sunnah; b) ilmu pengetahuan dan seni dan pencapaian-pencapaian besar manusia, bersama dengan usaha untuk memantaskan kehidupan umat manusia selanjutnya; dan c) peniadaan segala bentuk penindasan, baik berbentuk hukum dan kepatuhan terhadapnya, ataupun berbentuk dominasi.

Sebagai ‘Republik Islam’, bentuk negara yang diambil oleh Iran memiliki elemen-elemen yang membuat ia menjadi ‘Islam’ sekaligus ‘republikan’. Namun, Republik Islam Iran dibangun di atas prinsip suatu teori politik Islam yang kental dengan tradisi Islam Syi’ah, dikenal dengan *velayat-e faqih*, sehingga penting untuk melihat tentang apa sebetulnya teori tersebut dan bagaimana aktualisasinya di ranah praksis karena prinsip ini tidak diadopsi oleh seluruh ‘Republik Islam’ atau ‘Negara Islam’ di dalam Dunia Islam.

*Velayat-e faqih* yang dirumuskan oleh Khomeini terbatas pada persoalan mengapa suatu pemerintahan Islam dibutuhkan dan mengapa fuqaha mewarisi kewalian para Imam<sup>23</sup> untuk menjalankan pemerintahan Islam tersebut. Tulisan Khomeini tentang pemerintahan Islam hanya sampai pada bagaimana cara menggulingkan pemerintahan lama agar pemerintahan Islam tersebut terlaksana, yang oleh Khomeini dirumuskan dengan cara: 1) memutuskan semua hubungan dengan institusi pemerintah; 2) menolak bekerjasama dengan pemerintah; 3) menahan diri dari tindakan yang mungkin dapat menolong pemerintah; dan 4)

---

<sup>23</sup>Imam adalah sebutan 12 pemimpin Islam setelah kematian Nabi Muhammad di dalam keyakinan Syiah.

membentuk institusi yudisial, finansial, ekonomi, kultural, dan politik yang baru.<sup>24</sup>

Agar terlihat konkrit menyatu dengan Republik Islam, prinsip *velayat-e faqih* perlu diterjemahkan, diaktualisasikan, dan diinstitusionalisasikan ke dalam bentuk Konstitusi sehingga dimensi praksisnya terlihat. Dalam hal ini, jasa Mehdi Bazargan, salah seorang nasionalis revolusioner, tidak bisa dilupakan. Bazargan menggabungkan prinsip abstrak *velayat-e faqih* Khomeini dengan Konstitusi Republik Kelima Prancis yang republikan menjadi Konstitusi Republik Islam Iran. Inilah yang membuat identitas tipe Iran menjadi jelas sebagai negara berbentuk ‘Republik Islam’ yang bersandar kepada prinsip *velayat-e faqih* yang membuat Iran berbeda dengan negara-negara Islam lainnya.

Ketika Konstitusi selesai disusun dan disahkan, konsekuensi-konsekuensi politis pun muncul dan menunjukkan sifat republikan Iran. *Pertama*, adanya pemilihan umum yang diikuti oleh warga negara dewasa—termasuk perempuan—untuk memilih presiden, parlemen, dewan

di tingkat provinsi dan lokal, dan anggota Majelis Ahli. *Kedua*, adanya otoritas yang dimiliki oleh Parlemen seperti yang umumnya ada pada negara republik. *Ketiga*, Konstitusi pada akhirnya tidak bisa mengabaikan janji-janji populis seperti: uang pensiun, pemberian uang terhadap pengangguran, bayaran untuk kaum berkebutuhan khusus, perumahan yang layak, fasilitas kesehatan, dan pendidikan gratis untuk tingkat sekunder dan primer.<sup>25</sup>

### Identitas Peran

Dalam pandangan Konstruktivisme, terdapat identitas yang ditentukan oleh diri sendiri (*self*) semata dan ada identitas yang didapatkan melalui hubungan antara diri sendiri (*self*) dengan pihak lain (*others*). Dua identitas yang telah dibahas—korporat dan tipe—ditentukan oleh diri sendiri. Namun, dua identitas selanjutnya—peran dan kolektif—ditentukan oleh hubungan dengan pihak lain. Sebutan lain untuk identitas peran ini adalah ‘identitas sosial’ (*social identity*) yang oleh Wendt didefinisikan sebagai ‘seperangkat makna yang diatribusikan oleh aktor terhadap dirinya sendiri saat mengambil perspektif pihak lain.’<sup>26</sup> Dengan begitu, makna

<sup>24</sup> Ayatollah Khomeini, *Islam and Revolution: Writing and Declarations of Imam Khomeini (Hokumat-i Islam: Velayat-e Faqih)*, terj. Hamid Algar (Berkeley: Mizan Press, 1981), 146.

<sup>25</sup> Ervand Abrahamian., 166-167.

<sup>26</sup> Alexander Wendt, “Collective Identity Formation and the International State” *The American Political Science Review*, vol.88, no.2 (June, 1994), 385.

identitas peran Iran hanya dapat dipahami dengan menghadirkan pihak lain.

Iran mendefinisikan dirinya sendiri sebagai sebuah ‘Republik Islam’ yang dibangun di atas prinsip *velayat-e faqih*. Bagi Khomeini, pemandu jalannya ideologi republik tersebut, hal yang utama adalah menyatukan ‘Dunia Islam’ menjadi satu kesatuan *ummah*. Keberhasilan revolusi di Iran, bagaimanapun dalam pandangan Khomeini, harus disebarluaskan ke seluruh dunia. Dari sinilah lahir istilah ‘ekspor revolusi’ (*sudur-e enqelab*) yang merupakan konsekuensi logis dalam rangka menguatkan identitas-identitas Iran. Dengan menelisik pandangan diri sendiri (*self*) sebagai Republik Islam yang berhasil berdiri dari sebuah Revolusi Islam dan menerjemahkan kondisi sosialnya sebagai sesuatu yang rusak dan harus diperbaiki dengan mengekspor revolusi, Iran telah mengambil tempat di dalam struktur sosialnya sehingga dapat ditarik suatu identitas peran atau sosial yaitu sebagai “pusat dunia Islam” (*umm al-qura*), negara revolusioner yang bermaksud mengubah struktur sosial sistem internasional.

Menurut Mohammad Javad Larijani, sebagaimana dikutip oleh Said Amir Arjomand, keberhasilan Revolusi Islam di Iran telah membuat Iran menjadi *Umm*

*al-Qura*’ atau ‘Ibu Kota’ bagi Kediaman Islam.<sup>27</sup>

Identitas sebagai pusat dunia Islam merupakan sesuatu yang besar dan butuh penguatan yang lebih gigih, mengingat disintegrasi dalam komunitas Muslim. Di sini Iran melihat perannya sangat besar sebagaimana ditegaskan di dalam Pembukaan Konstitusi 1979:

“Konstitusi memberikan landasan untuk menjamin keberlanjutan Revolusi di rumah sendiri dan luar negeri. Khususnya, dalam perkembangan hubungan internasional, Konstitusi akan berusaha dengan gerakan Islam dan popular untuk menyiapkan jalan bagi pembentukan komunitas dunia yang tunggal (yang sejalan dengan perintah *al-Qur‘ān*: “Sesungguhnya inilah komunitas kamu semua; komunitas yang satu; dan Aku adalah Tuhan kamu, maka sembahlah Aku” (Q.S. 21:92), dan untuk menjamin keberlanjutan perjuangan pembebasan semua

<sup>27</sup> Said Amir Arjomand, *After Khomeini: Iran under His Successors* (New York: Oxford University Press, 2009), 134.

*masyarakat tertindas di dunia.”*

Untuk lebih lanjut memahami *umm al-qura'*, mesti berangkat dari bagaimana Iran melihat posisinya pada pihak di luar dirinya. Dalam hal ini pandangan-pandangan Khomeini tentang tatanan atau sistem internasional tidak bisa diabaikan karena peran signifikannya sebagai *vali-e faqih*. Pada bagian ini penulis berhutang kepada ulasan komprehensif Muhammad Rida Dehshiri tentang sistem internasional menurut Khomeini dan tentang apa yang bisa dilakukan *umm al-qura'* pada sistem tersebut.

Dimulai dari karakteristik struktural sistem internasional dalam pandangan Khomeini, Dehshiri menjelaskan bahwa ada dua aspek untuk melihat struktur sistem internasional: jumlah dan tipe aktor-aktor. Dari segi jumlah pemain utama dalam sistem internasional, Khomeini menolak sistem bipolar yang membagi dunia berdasarkan dua negara adidaya sekaligus menolak dua ideologi dominan: komunisme dan kapitalisme. Khomeini juga skeptis terhadap dependensi struktural negara-negara satelit dengan negara-negara utama yang kuat. Bagi Khomeini, dunia yang seperti ini tidak menghasilkan apa-apa kecuali penjarahan kekayaan bangsa-bangsa yang tertekan oleh negara-negara

adidaya yang disebut oleh Khomeini sebagai 'arogan'. Dalam hal ini Khomeini berkeinginan akan adanya kesetaraan legal bangsa-bangsa dan ketiadaan supremasi suatu kelompok atas kelompok lain. Di dalam sistem internasional ini, Khomeini lebih banyak merujuk kepada pentingnya aktor bangsa ketimbang negara atau dengan kata lain aktor non-pemerintah dianggap memiliki peran lebih signifikan daripada aktor pemerintah. Khomeini beralasan negara-negara yang lemah memiliki ketergantungan kepada negara kuat karena secara psikologis, sifat alamiah manusia adalah memiliki hasrat yang tidak terbatas. Ketika negara lemah memiliki hasrat tak terbatas untuk mengejar kekayaan dan posisi, maka ia membutuhkan sandaran. Siapapun yang menginginkan posisi dan kepemimpinan membutuhkan sandaran yang dapat berupa Tuhan, rakyat, atau pihak asing. Namun, pemerintahan yang lemah, pada umumnya, menjadikan pihak asing sebagai sandaran sehingga ia tidak akan memihak kepada rakyat.<sup>28</sup>

Dari segi fungsinya, Khomeini melihat sistem internasional sebagai sistem konfliktual yang menolak sistem

<sup>28</sup> Muhammad Rida Dehshiri, "Ways of Attaining the Ideal International Order from Imam Khomeini's Viewpoint," in *Imam Khomeini and the International System*, trans. Mansoor Limba (Teheran: The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works, 2005), 52-53.

konservatif dan sistem kompetitif. Sistem konservatif yang menjaga status quo ditolak karena memberikan hak veto terhadap negara adidaya semata. Sistem kompetitif yang ditunjukkan dengan adanya kompetisi antara negara adidaya ditolak karena hanya mengeruk sumber daya alam dan kekayaan negara-negara lain. Dehshiri berkesimpulan bahwa Khomeini melihat sistem internasional sebagai sistem konfliktual karena negara adidaya tidak ubahnya seperti serigala yang saling menakuti satu sama lain dan siap melahap kekuatan-kekuatan yang lemah. Sehingga bangsa-bangsa tertindas dihimbau oleh Khomeini untuk bangkit dan melakukan revolusi mengubah sistem tersebut.<sup>29</sup> Menurut Dehshiri pula, Khomeini melihat fungsi sistem internasional sebagai sistem revolusioner yang menekankan pada perubahan menyolok tatanan internasional yang ada. Sudut pandang revolusioner Khomeini didasarkan pada adanya perjuangan permanen kebaikan melawan kejahatan, perang antara masyarakat miskin dan kaya, dan antara bangsa-bangsa tertindas dan negara-negara arogan.<sup>30</sup> Dengan kondisi yang seperti inilah, Khomeini memosisikan peran Iran sebagai pembela bangsa-bangsa tertindas, yang kebetulan pada konteks zaman itu umat Muslim

ditafsirkan berada pada posisi sebagai bangsa-bangsa tertindas, sehingga peran sebagai *umm al-qura* menjadi hidup.

### Identitas Kolektif

Identitas kolektif menurut Wendt adalah identitas yang menghasilkan 'identifikasi' diri sendiri (*self*) dengan pihak luar (*other*) melalui pengaburan perbedaan di antara keduanya. Pembentukan identitas kolektif ini menggunakan identitas-identitas peran dan tipe, dan pada tingkat yang lebih tinggi dapat membuat *self* dan *other* pada akhirnya memiliki identitas tunggal dimana aktor-aktor kemudian mendefinisikan 'keselamatan *other* sebagai bagian dari keselamatan *self*' sehingga terkesan altruistik.<sup>31</sup>

Bagian ini hanya akan mengidentifikasi apa yang menjadi identitas kolektif yang *diharapkan* oleh Iran. Disebut 'diharapkan' karena identitas kolektif yang diharapkan belum tentu akan diterima oleh aktor-aktor lain. Identitas kolektif yang baru akan dikatakan terbentuk ketika batas antara *self* dan *other* menjadi kabur. Artinya, identitas kolektif tidak hanya menjadi milik *self*, tetapi juga milik *other*.

Identitas kolektif yang diharapkan terwujud oleh Iran adalah Pan-Islam, suatu

<sup>29</sup> Ibid., 53-59.

<sup>30</sup> Ibid., 60.

<sup>31</sup> Alexander Wendt, *Social Theory*, 229.

kesatuan yang holistik dalam dunia Islam. Hal ini telah tampak pada ulasan-ulasan sebelumnya. Pada identitas korporat, Iran berupa 'Iran Islam' disimpulkan bahwa di atas nasionalisme Iran, dorongan untuk mengupayakan persatuan Islam lebih kuat. Pada identitas tipe Iran sebagai "Republik Islam", republik tersebut didirikan di atas prinsip *velayat-e faqih*, sementara alasan dibentuknya pemerintahan di atas prinsip tersebut ditujukan untuk membebaskan Muslim tertindas dari dominasi kolonialisme dan imperialisme dan dari pemerintahan sekuler yang tidak menjalankan hukum-hukum Islam. Sehingga, dari kedua identitas tersebut kemudian muncul identitas peran *umm al-qura*' yang memiliki peranan sebagai pusat dari dunia Islam, model pemerintahan Islam yang dapat dicontoh, dan penyokong setiap aksi-aksi revolusioner di negeri-negeri Muslim agar terwujud kesatuan *ummah*. Tentu saja, revolusi ini akan dianggap sukses pada level yang lebih luas ketika terbentuk kesatuan Islam seperti yang diinginkan oleh Khomeini dan Iran, berupa Pan-Islam.

### Kesimpulan

Tulisan ini telah mendiskusikan perilaku Republik Islam Iran di kawasan Timur Tengah yang ditelusur secara historis pada sepuluh tahun pertama negara

tersebut terbentuk. Lahir dari Revolusi Islam 1979 yang menjatuhkan rezim sekuler dan pro-asing, Iran bermaksud memicu revolusi yang sama di negara-negara Timur Tengah lainnya. Agenda ini dikenal dengan istilah 'ekspor revolusi'. Dipahami pula, bahwa perilaku politis ini tidak lepas dari identitas Iran sebagai sebuah negara yang sedari semula berbasis Islam, dan memandang dirinya sebagai pusat dari dunia Islam, sehingga merasa perlu membangun suatu identitas kolektif Pan-Islam di kawasan Timur Tengah.

### Referensi

- Abrahamian, Ervand. *A History of Modern Iran*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Arjomand, Said Amir. *After Khomeini: Iran under His Successors*. New York: Oxford University Press, 2009.
- Dehshiri, Muhammad Rida. "Ways of Attainining the Ideal International Order from Imam Khomeini's Viewpoint." In *Imam Khomeini and the International System*, translated by Mansoor Limba, 51-70. Teheran: The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works, 2005.

- Halliday, Fred. *Revolution and World Politics: The Rise and Fall of the Sixth Great Power*. Durham: Duke University Pressm 1999.
- "The Sixth Great Power: on the Study of Revolution and International Relations." *Review of International Studies*, 16/3 (1990): 207-221.
- Hinnebusch, Raymond. *The International Politics of the Middle East*. Manchester: Manchester University Press, 2003.
- Katzman, Kenneth. "Iran's Foreign Policy." *Congressional Research Service*. (2016): 1-36.
- Khomeini, Ayatollah. *Islam and Revolution: Writing and Declarations of Imam Khomeini (Hokumat-i Islam: Velayat-e Faqih)*. Translated by Hamid Algar. Berkeley: Mizan Press, 1981.
- *Sahifeh-ye Imam: An Anthology of Imam Khomeini's Speeches, Messages, Interviews, Decrees, Religious Permissions, and Letters*, vol. 12. Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works, 2008.
- Marschall, Christin. *Iran's Persian Gulf Policy: From Khomeini to Khatami*. London: Routledge, 2003.
- Muhammad, Simela Victor. "Krisis Hubungan Arab Saudi-Iran." *Info Singkat Hubungan Internasional VIII*, no. 01. (2016): 5-8.
- Pahlavi, Pierre. "Understanding Iran's Media Diplomacy." *Israel Journal of Foreign Affairs*, vol. 6, no. 2 (2012): 21-33.
- Panah, Maryam. *The Islamic Republic and the World: Global Dimensions of the Iranian Revolution*. London: Pluto Press, 2007.
- Schmidt, Soren. "The Role of Religion in Politics: The Case of Shia-Islamism in Iraq." *Nordic Journal of Religion and Society*, vol. 22, no. 2 (2009): 123-143.
- Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- "Collective Identity Formation and the International State." *The American Political Science Review*, vol. 88, no. 2 (June, 1994): 384-396.

Yarshater, Ehsan, ed. *Encyclopaedia Iranica*, vol. X. California: Mazda Publisher, 2001.